

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN BAGI BUPATI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA

Irsandi

Universitas Bandar Lampung  
e-mail : irsandi@ubl.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas didalam pelaksanaannya dengan fokus implementasi pada lingkungan keprotokolan setda Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk memberikan jawaban dari rumusan permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sebuah pendekatan deskriptif kualitatif/studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata yang belum berjalan efektif dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya koordinasi antar stakeholder, aspek sumber daya berkualitas yang perlu di tambah serta, fasilitas yang belum memadai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Keprotokolan Bupati, Kabupaten Lampung Tengah, Bidang Pariwisata.

### Abstract

*This study analyzes the implementation of protocol services policy for regents in central lampung regency in the framework of regional autonomy in the field of tourism. This research was conducted with the aim to provide an overview of its effectiveness in its implementation with a focus on implementation in the protocol environment of the Central Lampung regency, as well as to provide answers to the formulation of existing problems. In analyzing the Implementation of Protocol Service Policy Implementation for Regents in Central Lampung Regency in the Framework of Regional Autonomy in the Field of Tourism. This research was conducted using the type of qualitative research, with a qualitative descriptive approach / case study. Case studies are research on humans (can be a group, organization, or individual) and events / phenomena that occur in the community. Data collection in this study was obtained from interviews with several informants involved in the implementation of protocol services policy for regents in central lampung regency in the framework of regional autonomy in the field of tourism, observation and documentation. The results of the study are the implementation of protocol service policy for regents in central lampung regency in the framework of regional autonomy in the field of tourism which has not been effective in efforts to improve tourism in central lampung regency. This is indicated by the lack of coordination between stakeholders, aspects of quality resources that need to be added and inadequate facilities.*

*Keywords: Policy Implementation, Regent's Protocol Services, Central Lampung Regency, Field of Tourism*

---

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Lampung Tengah. Sampai saat ini terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti: Curug Tujuh, Air Terjun Curug Lestari, Danau Tirta Gangga, Danau Bekri, Bukit Tumpang, Bukit Batubara, Telaga Rejo/Telogo Rejo, Danau Biru Batu Padas, Kolam Renang Telaga Putri dan Wisata Alam Karya Tama.

Sebagai daerah otonomi, tentunya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus berbenah dan melakukan pembangunan di segala sektor dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan oleh Lampung Tengah merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang besar tentu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan untuk kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjangkau tempat tujuan wisatanya.

Lampung Tengah terus berupaya menarik para wisatawan untuk datang dengan menggelar beberapa kegiatan yang menarik. Penyelenggaraan *event* pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah seperti Festival Lomba Dayung dalam rangka Gebyar Wisata Lampung Tengah Tahun 2019. Lomba yang diselenggarakan di Sungai Cabang Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Festival Kopian Emas tahun 2019 yang diselenggarakan di Nuwo Balak Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Tengah. Festival pariwisata yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Bupati di Kabupaten Lampung Tengah dalam Kerangka Otonomi Daerah Pada Bidang Pariwisata. Hal ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dari organisasi perangkat daerah lainnya seperti dengan Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam

Nurdin dan Usman, (2003: 7) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Menurut Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Nugroho (2004: 159) mengatakan bahwa Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya: (1) Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. (2) Pandai bercakap-cakap; petah

lidah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai :(1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peran yang amat penting dalam pelaksanaan suatu event festival kepariwisataan karena dalam event festival kepariwisataan tentunya dihadiri oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sampai sekarang belum dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan maksimal dalam memberikan kebijakan pelayanan kepada Bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat peran Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di era otonomi daerah sekarang ini, diharapkan fungsi

keprotokolan mampu membangun citra daerah yang positif dalam kerangka otonomi daerah terutama dalam sektor pariwisata.

Koordinasi antar instansi atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah sangat diperlukan dalam upaya membangun citra daerah yang positif dalam kerangka otonomi daerah terutama dalam sektor pariwisata. Namun dalam kenyataannya koordinasi antar instansi atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah masih rendah, sehingga belum mampu membangun citra daerah yang positif dalam kerangka otonomi daerah terutama dalam sektor pariwisata. Sumber daya manusia, sarana dan prasana, anggaran menjadi faktor penghambat dalam membangun citra daerah yang positif dalam kerangka otonomi daerah terutama dalam sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Implementasi Kebijakan Pelayanan Keprotokolan Bagi Bupati Di Kabupaten Lampung Tengah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Pada Bidang Pariwisata”, sebagai bahan penelitian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Bupati di Kabupaten Lampung Tengah dalam kerangka otonomi daerah pada Bidang Pariwisata, untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Bupati di Kabupaten Lampung Tengah dalam kerangka otonomi daerah pada Bidang Pariwisata dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Bupati di Kabupaten Lampung Tengah dalam kerangka otonomi daerah pada Bidang Pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menguraikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Suharsaputra, 2012: 181).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama

kurun waktu tertentu dengan cukup dalam dan menyeluruh.

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Implementasi Kebijakan Pelayanan Keprotokolan Bagi Bupati Di Kabupaten Lampung Tengah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Pada Bidang Pariwisata. Lokasi penelitian ini di lingkungan keprotokolan setda Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari informan, peristiwa dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam, dan alat tulis. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011: 224) Analisis model interaktif tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Analisis Aspek Penghambat Serta Pendukung Pada Pelaksanaan Program Pelayanan Keprotokolan Dalam Rangka Pengembangan Objek wisata di Kab. Lampung Tengah. Didalam

penyelenggaraan sebuah kebijakan maka yang menjadi fokus utama adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik unsur pelayanan keprotokolan terhadap Bupati Lampung Tengah didalam penyelenggaraan kegiatan untuk pengembangan Objek Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah menjadikan unsur penting agar pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan objek Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah dapat berjalan dengan efektif untuk itu penulis menganalisis berkaitan dengan pelayanan keprotokolan dalam rangka pengembangan objek wisata kabupaten lampung tengah melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Resposivitas dan Ketepatan (Dunn, 2003:610) dimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan terhadap keberhasilan sebuah implemementasi kebijakan.

### **a. Efektivitas**

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals*

*are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61) “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Untuk itu didalam pelaksanaannya pelayanan keprotolan yang telah di selenggarakan oleh Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah didalam melaksanakan rangkaian kegiatan Bupati Lampung Tengah beserta unsur pemerintahan di dalamnya maka Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sangat memperhatikan efektifitas didalam penyelenggaraan kegiatan itu sendiri. Dimana dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sedang fokus terhadap pengembangan objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti yang telah di ungkapkan Bupati Lampung Tengah sebagai informan penulis bahwa kepariwisataan yang ada di Kabupaten

Lampung Tengah harus segera di perkenalkan kepada seluruh masyarakat indonesia bahkan manca negara maka untuk itu Bupati Lampung Tengah menginginkan adanya festival atau event yang nantinya mengangkat seluruh pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah agar masyarakat akan lebih menganal dari penyelenggaraan ini. Untuk itu event ini di anggap sangat penting untuk menjunjung pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sehingga keberhasilan pelaksanaan acara sangat di harapkan.

Untuk pelaksanaan sebuah event yang bertujuan mengangkat kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah maka yang memiliki tanggung jawab besar adalah Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mana hal ini juga sesuai dengan tupoksi dari Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Selain dari pada itu seperti yang telah di ungkapkan oleh Kasubbag Acara Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Lampung Tengah bahwa Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah koordinasi terhadap instansi/ organisasi perangkat daerah lainnya tentu dinilai sangat penting dimana dalam hal

ini bersama dengan dinas pariwisata yang ikut serta ambil peran terhadap pelaksanaan program yang telah di cetuskan oleh Bupati Lampung Tengah untuk pengembangan Objek wisata di kabupaten Lampung Tengah sehingga koorninasi yang di bangun harus benar-benar efektif. Hal ini yang masih sering terjadi kendala lapangan di mana koordinsi yang di bangun tidak terlalu efektif sehingga hasil kegiatan di rasa kurang maksimal bagi penilaian Bupati Lampung Tengah itu sendiri.

Meskipun demikian diketahui bahwa yang menjadi aspek pendukung didalam program ini adalah dimana program ini didukung penuh oleh Bupati Kabupaten Lampung Tengah serta masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa diharapkan mampu mengenalkan Kabupaten Lampung Tengah kepada Nasional bahkan Internasional melalui pariwisatanya, hal ini tentu menjadi dukungan tersendiri agar program ini dapat berjalan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di ketahui bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang

kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

#### b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya

diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003:430).

Didalam penyelenggaraan *event* pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah seperti Festival Lomba Dayung dalam rangka Gebyar Wisata Lampung Tengah Tahun 2019. Lomba yang diselenggarakan di Sungai Cabang Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Festival Kopian Emas tahun 2019 yang diselenggarakan di Nuwo Balak Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Tengah dan juga festival pariwisata yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah maka perlu adanya efisiensi demi penyelenggaraan *event* yang berhasil, namun pada pelaksanaannya masih di temukan banyak kendala di lapangan yang mengakibatkan efisiensi dari pelaksanaan program ini tidak begitu baik. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Kasubbag Acara Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Lampung Tengah dimana beberapa kali dalam pelaksanaan

rangkaian program seperti event-event yang telah di selenggarakan sumber daya kami yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan acara kita sering kali kekurangan sehingga ini menimbulkan efisiensi dari penyelenggaraan acara tidak sesuai dengan yang di harapkan artinya sangat di perlukan perbaikan secara menyeluruh demi keberhasilan program dari pengembangan objek wisata melalui event-event yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Sasaran yang ingin dicapai ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

#### c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Permasalahan dalam aspek kecukupan yang terjadi di dalam pelaksanaan program ini seperti yang telah di ungkapkan oleh Bupati Lampung Tengah adalah aspek anggaran, yang mana anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sangat terbatas sehingga tentu mempengaruhi terhadap pelaksanaan rangkaian program itu sendiri, namun pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat ini mengupayakan untuk mendapatkan sumber anggaran dari pemerintah pusat maupun swasta demi keberhasilan pengembangan objek wisata Kabupaten Lampung Tengah yang maksimal.

Persoalan ini tentunya dinilai mempengaruhi terhadap fasilitas maupun sumber daya yang dibutuhkan demi keberhasilan program sehingga dengan segera memperbaiki pada aspek ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah program yang akan

di selenggarakan. Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

#### d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa didalam aspek lainnya masih ditemukan kendala-kendala yang cukup berarti seperti koordinasi yang belum efektif, kualitas sumber daya yang belum efisien serta kecukupan anggaran yang masih menjadi problem didalam penyelenggaraan program pengembangan objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini tentu untuk menunjang dari kunci pemerataan berdasarkan keadilan atau kewajaran masih nilai belum cukup baik perlu adanya perbaikan secara menyeluruh.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik hal ini lah yang menjadi acuan Bagian Keprotokolan Setda Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan program yang di berikan oleh Bupati Lmapung Tengah sebagai pimpinan.

#### e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dinilai cukup mendukung dengan di ketahui kehadiran masyarakat saat pelaksanaan program rangkaian kegiatan seperti event yang telah di selenggarakan cukup antusias untuk menghadiri program tersebut. Hal ini juga di sampaikan oleh Bupati Lampung Tengah dimana masyarakat kami lihat sangat antusias

untuk mendukung program pengembangan objek wisata ini tentu kami sangat bangga karena ini nantinya juga demi mewujudkan kemajuan Kabupaten Lampung Tengah terutama dalam kepariwisataan Kabupaten Lampung tengah agar lebih di kenal lagi di seluruh penjuru indonesia terlebih manca negara nantinya.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik

dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Program ini tentunya dinilai sudah sangat tepat karena selain nantinya akan memperkenalkan Kabupaten Lampung Tengah kepada dunia melalui pariwisata juga diharapkan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat tentunya nantinya akan lebih sejahtera. Ketepatan yang di nilai belum berhasil tentunya adalah kaitannya dengan indikator keberhasilan kebijakan lainnya seperti perbaikan jalan untuk akses menuju objek wisata serta keamanan dan kenyamanan untuk para pengunjung sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bupati Lampung Tengah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa didalam implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata belum efektif dimana masih

terdapat kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata.

Ditemukan kendala-kendala yang cukup berarti seperti koordinasi yang belum efektif, kualitas sumber daya yang belum efisien serta kecukupan anggaran yang masih menjadi problem didalam penyelenggaraan program pengembangan objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah. Hal lain yang menjadi aspek penghambat program ini adalah bentuk koordinasi horizontal dan vertikal yang di bentuk juga masih lebih dominan dengan diketahui bahwa masih terjadinya komunikasi yang belum efektif yang di bangun antar bagian maupun antar instansi/organisasi perangkat daerah lainnya. Sedangkan pada aspek pendukung diketahui bahwa program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah serta masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas untuk itu penulis menyarankan agar implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati di kabupaten

lampung tengah dalam kerangka otonomi daerah pada bidang pariwisata berjalan efektif maka di perlukan perbaikan diantaranya pada aspek kendala yang di hadapi seperti sumberdaya yang cukup serta berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup, ketepatan dan perataan antar aspek yang menjadi pendukung program serta koorsinasi horizontal dan vertikal yang di bentuk antar bagian maupun instansi/organisasi perangkat daerah lainnya yang harus lebih efektif lagi. Hal ini penting demi tertselenggaranya program dengan baik dan mampu mencapai tujuan untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell.J.W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damanik. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
- Danim, 2004. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada. University Press. Yogyakarta.

- Farida.L. dan Lustiadi.Y., 2015. *Pedoman Penulisan Tesis*, MIA-UBL Press. Bandar Lampung
- Gedeian. 1991. *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver
- Hasibuan. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara,. Jakarta.
- Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung.
- Kusmayadi dan Sugiharto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP. YKPN. Yogyakarta.
- Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pitana dan Gyatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI dan Lukman Offset. Yogyakarta
- Widodo. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV. Citra. Malang.
- Youti. 1991. *Pengantar Ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.